



Dana Kalurahan Tak Dipangkas

WONOSARI—Pemkab Gunungkidul memastikan tidak ada pemangkasan pagu anggaran yang digelontorkan ke kalurahan dengan mengacu pada Instruksi Presiden No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul Waziroh memaparkan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk merasionalisasi anggaran di daerah.

Adapun, kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Gunungkidul. "Tidak ada pemangkasan untuk ADD. Jadi, pagu anggaran yang digelontorkan tetap sesuai dengan rencana awal," tuturnya, Senin (10/2).

Pagu ADD di tahun ini sebesar Rp123,94 miliar dengan alokasi yang diterima di masing-masing kalurahan bervariasi karena ada indikator khusus guna menetapkan besaran anggaran yang diperoleh. Proses pencairan juga sudah berlangsung hingga sekarang dan sudah masuk tahap kedua. ADD dicairkan setiap bulan dan berlangsung selama setahun.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul Khoiril Rahmat memaparkan tidak ada masalah berkaitan dengan pagu dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Alokasi tidak terkena pemangkasan sehingga penyaluran sesuai dengan proyeksi awal. Untuk yang dipagukan tetap berjalan karena tidak ada kebijakan pemangkasan. Pagu dana desa pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp168,8 miliar yang terdiri dari alokasi dasar Rp100,4 miliar dan alokasi formula Rp62,6 miliar.

"Selain itu, juga ada alokasi kinerja Rp5,6 miliar sehingga total jumlahnya untuk 144 kalurahan di Gunungkidul sebesar Rp168,8 miliar. Untuk alokasi sangat bergantung dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat," ucap Khoiril.

(David Kurniawan)